

PERAN UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME (UNDP) DALAM MELEGALKAN PERNIKAHAN LESBIAN, GAY, BISEXUAL, TRANSGENDER (LGBT) DI TIONGGOK

By :

Aira Tama¹

Email : Airatama95@gmail.com

Supervisor : Dra. Den Yealta M.Phil

Bibliography : 10 Journals, 22 Books, 18 Website, 2 Documents

Departement Of International Relations

Faculty Of Social and Political Sciences University Of Riau

Kampus Bina Widya JL. HR, Subrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293.

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

This study attempts to outline anything program-program undp in legalising lgbt marriage in china. And also will explain how program-program undp in legalising lgbt marriage in china. The methodology used is qualitative study. This study focused to talk about the role in the United Nations Deveopment Program (UNDP) legalising lgbt in the country tionggok. Second, researchers feel the need to give time limit to phenomena or problem to check such as in 2014-2016

This research use a pluralism perspective and international organizations theory. The level analysis is international organizations, this reseach also includes the concept of human rights as the point of views this research.

The result of this research UNDP support lesbian community , gay , bisexual , and transgender (LGBT) Community to get the rights one of which is a same-sex marriage.

Keywords: United Nations Deveopment Programme (UNDP), LGBT, Same Marriage, Tionggok

¹Mahasiswa Jurusan Hubungan Internasional FISIP

Pendahuluan

Dampak perkembangan dari globalisasi ini memunculkan isu-isu transnasional salah satunya adalah isu gender.² Isu gender yang dulu tergolong dalam kategori low politics, mengalami perubahan menjadi isu high politics. Perubahan karakteristik isu ini didukung oleh adanya proses globalisasi dan industrialisasi bagi negara-negara berkembang, maupun negara-negara maju. Isu gender sebagai lingkup kajian baru dalam Hubungan Internasional, mencoba untuk menjelaskan serta menganalisa perilaku Organisasi Internasional dengan fokus terhadap proses perkembangan isu LGBT (lesbian, gay, biseksual, and transgender). Isu LGBT sendiri tidak mengenal batasan usia, jenis kelamin, status sosial maupun pekerjaan bahkan agama.



Gambar 1 Major LGBT Websites In Mainland Tiongkok
Sumber : www.womenofTiongkok.cn

Pada peta diatas menjelaskan perkembangan dan penyebaran serta bentuk bertemunya para kaum LGBT di Tiongkok. Pada peta tersebut juga menerangkan jumlah anggota LGBT di Tiongkok mencapai 60.000 orang, adapun diantaranya Provinsi yang menjadi pendiri komunitas online LGBT ini yaitu daerah Beijing, Shanghai, Bagian Selatan Tiongkok Shicuan, Yunan, Xinjiang, Guizho, Chongqing dan Guangdong.

Isu LGBT ini juga masuk kedalam negara Tiongkok. Hal ini terjadi karena perkembangan globalisasi dan pola pikir masyarakat yang menjadi sangat modern. Di

pertengahan tahun 2000 Beijing melihat perkembangan grup LGBT telah fokus pada promosi, budaya, sosial, dan pendidikan seksual minoritas pada perempuan. Dalam tiga atau empat tahun lebih, kaum LGBT telah dikembangkan di Guangzhou, Shanghai dan kota metropolitan lainnya. Dan dapat dilihat pada gambar 1 diatas paling banyak terdapat di Xinjiang. Menurut Hinsch masuknya paham LGBT sejak abad ke 19 dan 20 ketika terjadinya pengaruh westrenisasi pada akhir dinasti Qing dan awal Republik Tiongkok.³

Menurut Badan Pembangunan PBB (UNDP), 95 %⁴ kaum lesbian, gay, minoritas seksual dan gender lainnya di Tiongkok menyembunyikan orientasi mereka karena khawatir akan menghadapi diskriminasi dan gangguan sosial. Setelah melakukan survei besar-besaran yang mencakup 30 ribu orang, Badan Pembangunan PBB (UNDP) mengatakan diskriminasi terhadap orang-orang gay dan minoritas seksual dan gender lainnya tidak hanya terbatas pada pekerjaan dan pendidikan saja tapi meluas ke kantor-kantor pemerintah dan sistem pengadilan. UNDP menambahkan kekerasan fisik dan emosional masih menjadi kenyataan khususnya dilingkungan keluarga, diskriminasi terus merugikan pekerjaan orang-orang LGBT (*lesbian, gay, biseksual, transgender, interseks*), memperkecil prospek karir dan potensi belajar mereka di sekolah-sekolah. Di Tiongkok pelegalan pernikahan sesama jenis didukung oleh organisasi tersebut yakni UNDP. Dimana UNDP memberikan bantuan dalam bentuk dana kepada kaum LGBT yang ada di negara Tiongkok dengan bertujuan untuk menciptakan perdamaian bagi kaum LGBT yang ada di Tiongkok.⁵ UNDP melakukan lobi kepada pemerintah Tiongkok agar dapat memberikan hak kaum LGBT dengan cara memberikan bantuan kepada pemerintah dan memberikan sumbangan dana untuk kampanye

² Scott Burchill dan Andrew Linklater. *Theories of International Relation*. 2009. New York: ST Martin's Press, INC. hal 320

³ Bret Hinsch. *Passion of The Cut Sleeve*. 1990. University of California press. Hal 35-36

⁴ *Statistic and Fact LGBTn Tiongkok*. (<http://www.statista.com/topics/2314/LGBT-in-Tiongkok/>) diakses pada 18 November 2016 diakses pukul 13:30

⁵ USAID. *Being LGBT in Asia: Tiongkok Country Report.pdf*. 2014. Bangkok hal.08

kaum LGBT. Hal ini dilakukan oleh UNDP agar kaum LGBT mendapatkan perlindungan hukum, mendapat perlakuan yang setara di kalangan masyarakat seperti hal pekerjaan, pendidikan, kesehatan, dan keluarga dan juga bertujuan agar kaum LGBT dapat diterima di kalangan masyarakat sekitar tanpa adanya perlakuan diskriminasi.⁶

Pelegalan sesama jenis yang terjadi di Tiongkok juga disebabkan dengan bantuan dari UNDP. Hal ini disebabkan karena pemerintah Tiongkok sudah menyetujui untuk melegalkan hubungan sesama jenis tetapi belum dalam bentuk pernikahan, pengabdian anak, serta masih terbatasnya lapangan pekerjaan sehingga kaum LGBT di Tiongkok merasa bahwa pemerintah masih membatasi pergerakan mereka dan membedakan status kemasyarakatan mereka. "*Being LGBT in Asia: A Participatory Review and Analysis of the Legal and Social Environment for LGBT Persons and Civil Society*"⁷ ini merupakan salah satu tujuan dan misi dari UNDP untuk membantu kaum LGBT mendapatkan hak yang sama dengan masyarakat lain pada umumnya.

Metode penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan atau proses menjangkau informasi dari kondisi sewajarnya dalam kehidupan suatu obyek, dihubungkan dengan pemecahan suatu masalah, baik dari sudut pandangan teoritis maupun praktis. Dengan pemecahan suatu masalah, baik dari sudut pandangan teoritis maupun praktis. Dengan kata lain, data-data yang didapatkan pada penelitian kualitatif tidak dapat dari perhitungan-perhitungan statistika ataupun berbagai hal yang menggunakan perhitungan angka, melainkan dengan menggunakan penjelasan ataupun alasan-alasan tertentu yang berkaitan dengan masalah yang terdapat dalam penelitian ini. Serta metode pengumpulan data

akan dilakukan dengan pengumpulan data dalam literature seperti buku cetak, jurnal, paper, koran online atau sumber website yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini

Hasil dan Pembahasan

UNDP memberikan bantuan kepada kaum LGBT di Tiongkok pada saat ini khususnya sejak Desember 2015 sudah dapat menikah dengan sesama jenis.⁸ Pelegalan sesama jenis pada saat ini sudah dapat diterima oleh masyarakat Tiongkok bahwa pasangan LGBT disana sudah semakin banyak. UNDP tetap memberikan dukungan dan dana untuk membantu kaum LGBT di Tiongkok agar tidak mendapatkan diskriminasi kembali. Serta kampanye mengenai pasangan LGBT masih tetap dilaksanakan karena masih ada pertolakan dari berbagai pihak di Tiongkok. 5 alasan kenapa dilegalkan pernikahan LGBT jadi hal istimewa yaitu: Hakim Agung melegalkan kesetaraan pernikahan bagi LGBT di 50 negara bagian Amerika Serikat. , Kurang dari setengah pegawai di 50 negara bagian tidak didiskriminasi oleh badan hukum berdasarkan orientasi seksual dan identitas gendernya, Paling tidak 80% gay kulit hitam berpengalaman dengan rasisme di komunitas gay, Meningkatkan kesetaraan dan tidak ada diskriminasi dalam masyarakat dan memupuk kesejahteraan sosial di antara masyarakat LGBT.

Program United Nations Development Programme (UNDP)

UNDP dan staf kantor di atas tanah di 166 negara, bekerja sama dengan pemerintah dan masyarakat setempat untuk membantu mereka menemukan solusi untuk global dan tantangan pembangunan nasional. UNDP berfokus pada enam program pembangunan terutama :

1. Mendukung Pemerintahan Dengan Sistem Demokratis UNDP mendukung pemerintahan demokratis nasional transisi

⁶Ibid hal.09

⁷Ibid hal.21

⁸Gay man sues for right to marry in Tiongkok's first same-sex marriage lawsuit

<https://www.scmp.com/news/Tiongkok/policies/article/1898421/gay-man-sues-right-marry-Tiongkoks-first-same-sex-marriage> diakses pada tanggal 23/10/2016 pukul 16:18 wib

demokratis dengan menyediakan nasihat kebijakan dan dukungan teknis, peningkatan kapasitas kelembagaan dan individu dalam negara, dan mendidik masyarakat tentang advokasi untuk reformasi demokrasi, mempromosikan dialog dan negosiasi, dan berbagi pengalaman sukses dari negara lain dan lokasi. UNDP juga mendukung lembaga-lembaga demokratis yang ada dengan meningkatkan dialog, meningkatkan debat nasional, dan memfasilitasi konsensus nasional pada program-program pemerintahan.

2. Menangulangi Kemiskinan. UNDP membantu negara-negara mengembangkan strategi untuk memerangi kemiskinan oleh memperluas akses terhadap kesempatan ekonomi dan sumber daya, program-program yang menghubungkan kemiskinan dengan negara tujuan dan kebijakan yang lebih besar dan memastikan suara yang lebih besar bagi masyarakat miskin. UNDP juga bekerja di tingkat makro untuk reformasi perdagangan, mendorong utang dan investasi asing, yang paling miskin dan memastikan masyarakat miskin mendapatkan keuntungan dari globalisasi.

Di lapangan, UNDP merupakan sponsor pembangunan proyek-proyek percontohan, mempromosikan peran perempuan dalam pembangunan, dan upaya koordinat antara pemerintah, LSM, dan donor luar. Dengan cara ini, UNDP bekerja sama dengan pemimpin lokal dan pemerintah untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat miskin untuk membuat usaha dan meningkatkan kondisi ekonomi. Misalnya saja Indonesia, kualitas manusia Indonesia benar-benar jauh lebih rendah dari Singapura (25), Brunei (33), Malaysia (58), Thailand (76), dan Filipina (83). Bahkan lebih rendah dari negara-negara "terbelakang" seperti Kirgistan (110), Guinea-Katulistiwa (109), dan Aljazair (108).

Konsep Gender dan Seksualitas

Ketika seksualitas berada dalam konsep bangsa dan negara, ia menjadi sesuatu yang tidak bisa berdiri sendiri, terkait dengan banyak hal. Keterkaitan ini menyebabkan seksualitas tidak lagi menjadi milik pribadi

tetapi bagian dari nilai komunal sehingga seksualitas diatur sedemikian rupa. Dalam masyarakat Indonesia di masa sebelum kemerdekaan, seksualitas yang baik adalah seksualitas yang dilakukan oleh lelaki dan perempuan untuk memperoleh keturunan, antara penis dan vagina, harus melalui pernikahan serta dilakukan di ruang pribadi. Seksualitas selain itu dianggap sesuatu yang salah dan melanggar norma, tidak beretika dan lainnya. Lalu muncul permasalahan heteronormativitas, yaitu ideologi tentang keharusan untuk menjadi heteroseksual, yang didasarkan pada penindasan orientasi seksual lain yang tidak berorientasi reproduksi keturunan seperti homoseksualitas. Juga keharusan akan kesesuaian antara identitas gender dan identitas seksual. Kalau beranatomi laki-laki, maka harus maskulin, dan sebaliknya bila beranatomi perempuan maka harus feminin. 2015. Dari Jumlah tahun 2015 tersebut tercatat sebanyak 1,365 orang (26.16 persen) berusia antara 20-29 tahun dan sisanya 632 orang (12.11 persen) berusia 30 tahun keatas. Tenaga kerja lokal Kota Dumai ini berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Namun lebih banyak yang berasal dari bumi melayu itu sendiri yakni Provinsi Riau terutama Kota Dumai.

Sejarah Berkembangnya LGBT Di Dunia Internasional

Jeremy Bentham (1785) seorang tokoh filsuf reformis dibidang sosial juga membela kaum homoseksual .Bentham sering memberikan masukan tentang hukum homoseksual di Inggris.Pemikiran Bentham menyumbangkan inspirasi perubahan aturan hukum terhadap kaum homoseksual mengenai homoseksual bukan suatu tindakan kriminal di Negara Eropa lainnya.Pada tahun 1791 Prancis adalah negara pertama yang menerapkan hukum bahwa homoseksual bukan termasuk tindakan krimina (Sinyo, 2014).

Gerakan *Free Love* yang membangkitkan kaum feminis dan kebebasan hidup juga turut memperjuangkan kaum homoseksual kepada publik.Gerakan ini kerap memandang budaya sucinya pernikahan yang dianggap membatasi kebebasan hidup dan

pilihan. Pada masa ini hampir semua negara di Eropa dan Amerika melahirkan tokoh reformis yang membela hak-hak kaum feminis, kehidupan bebas, dan komunitas homoseksual.⁹

Beberapa gerakan sosial seperti *The Black Power* yaitu gerakan untuk memperjuangkan hak kaum berkulit hitam dan *Anti-Vietnam War* mempengaruhi komunitas gay untuk lebih terbuka. Masa ini dikenal dengan *Gay Liberation Movement* atau gerakan kemerdekaan gay. Pada masa ini terjadi huru-hara yang terkenal dengan sebutan Stonewall Riots, yaitu keributan sporadis antara polisi dan para pendemo yang memperjuangkan kebebasan kaum gay. Keributan ini terjadi di Stonewall Inn, Greenwich Village, Amerika Serikat pada 28 Juni 1969. Kejadian 28 Juni 1969 tersebut tercatat dalam sejarah sebagai pemicu gerakan perjuangan hak asasi kaum gay di Amerika Serikat dan dunia, sehingga muncul komunitas-komunitas gay baru seperti *Gay Liberation Front (GLF)*, *The gay Activists' Alliance (GAA)*, dan *Front Homosexual d'Action Revolutionnaire*. Pada tanggal tersebut juga dijadikan hari perayaan bagi kaum LGBT di seluruh dunia dan pada hari tersebut mereka menggelar pawai di jalan utama untuk menunjukkan eksistensi kaum gay. United Nations Development Programme (UNDP) bersama United States Agency for International Development (USAID) terlibat dalam perjuangan homoseksual secara internasional. Salah satu langkah yang diambil adalah membentuk sebuah wadah internasional homoseksual khususnya negara-negara Asia yang bernama 'Being LGBT in Asia'. Salah satu negara yang terlibat adalah Tiongkok. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan adalah melakukan dialog-dialog LGBT di beberapa negara di Asia.

Sejarah LGBT di Tiongkok

⁹Paul, Ee Nam Park Hagland. 2012. *International Theory and LGBT Politics: Testing the Limits of a Human Rights-Based Strategy*. GLQ: A Journal of Lesbian and Gay Studies. Hal 30

Perilaku homoseksual di Tiongkok sudah ada pada abad ke-11 sebelum Masehi, yakni pada masa Dinasti Shang. Li Yinhe dalam bukunya yang berjudul *Tiongkok Homoseksualitas* menyebutkan istilah "Luan Feng" digunakan untuk menggambarkan homoseksualitas pada Dinasti Shang. Tidak ada catatan lesbianisme dalam sejarah Tiongkok. Jejak sejarah homoseksualitas bertahan melalui dinasti kedinasti dari zaman kuno dan tidak pernah hilang.¹⁰

Selama Dinasti Han berkuasa (206 SM - 220 M), kegiatan homoseksual dari kaisar dan menteri sering disimpan dalam catatan sejarah. Menurut Catatan Sejarah dan Dinasti Han, hampir semua kaisar dari Dinasti Han Barat memiliki pecinta sesama jenis. Kendati demikian, pada masa kini, Tiongkok menjadi salah satu negara yang sangat menentang homoseksualitas. Selama Revolusi Budaya (1966-1976), homoseksual menghadapi periode terburuk dalam sejarah Tiongkok. Pemerintah menganggap, homoseksualitas menjadi aib sosial atau bentuk penyakit mental. Polisi secara rutin menangkap gay dan lesbian. Karena tidak ada hukum yang menentang homoseksualitas, kaum gay dan lesbian didakwa dengan hooliganism atau mengganggu ketertiban umum. Cinta sejenis di Negeri Komunis, Tiongkok. Perlahan menjadi wacana yang mulai banyak diperbincangkan orientasi seks sejenis tidak lagi menjadi tabu di Negara yang paling padat penduduknya di dunia. Beberapa waktu lalu, *Tiongkok Daily* melansir sebuah berita tentang disediakannya sebuah taman kota yang didedikasikan untuk komunitas gay berkumpul, tepatnya di Mudanyuan, Distrik Haidian, Beijing.¹¹

Homoseksualitas di Tiongkok secara historis dianggap sebagai aspek "normal" dalam kehidupan bahkan keberadaan homoseksualitas di Tiongkok telah di dokumentasikan dengan baik sejak zaman kuno. Banyak kaisar Tiongkok awal yang berspekulasi memiliki hubungan homoseksual. Ideologi politik, filsafat, dan agama Tiongkok

¹⁰ Stevenson, Mark and Wu Cuncun. 2013. *Homoeroticism in Imperial Tiongkok: A Sourcebook*. New York: Routledge hal. 23

¹¹ *Ibid* hal. 27

kuno menganggap hubungan homoseksual sebagai aspek normal dari kehidupan, dan dalam beberapa kasus hubungan homoseksual sebagai teladan. Dalam sebuah literatur sastra di masa Dinasti Ming, Bian Er Chai (弁而钗/弁而钗), menggambarkan hubungan homoseksual lebih menyenangkan dan lebih “harmonis” dari hubungan heteroseksual. Seperti di Roma Kuno, hubungan homoseksual dianggap lazim, bahkan di pada masa Tiongkok kuno hubungan sejenis tidak dianggap sebagai moral “menyimpang” hingga sebelum masuknya budaya asing. Zhou merupakan perdana menteri dari era revolusi pada Oktober 1949 yang membawa Partai Komunis berkuasa sampai kematiannya akibat kanker pada 1976, beberapa bulan sebelum kematian rekannya yang revolusioner Mao Zedong, pendiri Tiongkok modern. Reuters memperoleh kutipan dari buku Tsoi yang berbahasa Tiongkok dan diterbitkan oleh rumah penerbitan yang sama dengan buku harian rahasia mantan kepala Partai Komunis Zhao Ziyang, yang digulingkan setelah insiden berdarah terhadap demonstran pro-demokrasi di Lapangan Tiananmen tahun 1989.

Gay tidak dilarang di Tiongkok, dan di kota-kota besar di Tiongkok, homoseksualitas merupakan tema yang biasa dijumpai. Meski demikian, masih banyak tekanan dari keluarga konvensional Tiongkok bagi para pria dan wanita gay untuk menikah dan memiliki anak. Sejumlah selebriti Tiongkok juga dapat mengaku soal homoseksualitas mereka di depan umum, tetapi sejauh ini tidak ada pejabat Tiongkok yang mengaku gay di publik.

Perkembangan LGBT Tiongkok

Sementara homoseks dianggap tidak melanggar hukum di Tiongkok, pernikahan sesama jenis dianggap ilegal dan pasangan sesama jenis tidak memiliki perlindungan hukum. Sebuah pengadilan Tiongkok untuk pertama kali menerima kasus pernikahan sejenis, yang diajukan seorang pria gay di

propinsi Hunan yang mempersoalkan penolakan pemerintah atas keinginan menikahi pasangan prianya. Pengacaranya mengatakan kepada Radio Free Asia, keputusan pengadilan itu dipuji sebagai langkah maju dalam memperjuangkan hak-hak kaum gay, dan sebuah uji kasus besar bagi hak-hak LGBT (lesbian, gay, bisexual dan transgender) di Tiongkok.¹²

Persoalan di Tiongkok mengenai pernikahan sesama jenis yang diajukan oleh seorang gay mendapat respon. Hal ini terbukti dengan bersedianya Tiongkok untuk memproses persoalan itu di pengadilan negeri di Changsha, Provinsi Hunan. Tiongkok bersedia untuk membawa perkara yang diajukan oleh gay tersebut ke persidangan. Keputusan Tiongkok atas responnya ini dapat dikatakan sebagai adanya kemauan dari pemerintah untuk mengatasi diskriminasi terhadap kaum LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender). Awalnya, gay, bernama Sun Wenlin yang mengajukan perkara tersebut ingin menikahi pasangannya, namun biro kependudukan dan catatan sipil Furong menolak pendaftaran pernikahan mereka berdua. Alasannya tentu saja karena pernikahan haruslah antara laki-laki dan perempuan. Tetapi menurutnya, secara hukum gugatannya akan berhasil karena UU perkawinan Tiongkok mengakui kebebasan menikah dan kesetaraan gender sehingga pernikahan sesama jenis seharusnya tidak dipersoalkan.¹³

Sementara homoseks yang dianggap tidak melanggar hukum di Tiongkok, pernikahan sesama jenis dianggap ilegal dan pasangan sesama jenis tidak memiliki perlindungan hukum. Apabila dikaitkan dengan HAM, memang pernikahan sesama jenis dapat dilegalkan. Mereka berhak untuk menentukan nasib sendiri dan memilih pasangannya sendiri. Gay yang mengajukan gugatan tersebut mengetahui benar pasti ada equality di Tiongkok. Bukan hanya di

¹² <http://www.voaindonesia.com/a/Tiongkok-gelar-sidang-kasus-pernikahan-sejenis-/3133223.html>

¹³ voaindonesia.com (2016), *Tiongkok Gelar Sidang Kasus Pernikahan Sejenis*, diakses di

<http://www.voaindonesia.com/content/Tiongkok-gelar-sidang-kasus-pernikahan-sejenis-/3133223.html>
(11/03/16, 14:50) diakses tanggal 24 April 2017

Tiongkok saja, bahkan di dunia juga. Tetapi permasalahan ini menjadi rancu.

Imperialisme asing (Amerika Serikat, Inggris dan Jepang). Pembangunan Indonesia sangat bergantung pada investasi modal asing baik berupa bantuan maupun hutang dan sumber kekayaan alam dikuasai perusahaan asing. Oleh sebab itu hutang Indonesia pada luar negeri terbilang cukup banyak dan besar jumlahnya.

Menurut Badan Pembangunan PBB (UNDP), 95 % kaum lesbian, gay, minoritas seksual dan gender lainnya di Tiongkok menyembunyikan orientasi mereka karena khawatir akan menghadapi diskriminasi dan gangguan sosial. Setelah melakukan survei besar-besaran yang mencakup 30 ribu orang, Badan Pembangunan PBB (UNDP) mengatakan diskriminasi terhadap orang-orang gay dan minoritas seksual dan gender lainnya tidak hanya terbatas pada pekerjaan dan pendidikan saja tapi meluas ke kantor-kantor pemerintah dan sistem pengadilan.

Laporan itu keluar hanya beberapa hari setelah pengadilan Tiongkok menolak tuntutan diskriminasi gender pertama yang diajukan oleh seorang transgender yang mengeluh ia dipecat dari pekerjaan karena orientasi dirinya. Majikan orang itu mengatakan kepada pengadilan tenaga kerja bahwa cara berpakaian penggugat akan berdampak negatif bagi perusahaan itu. UNDP menambahkan kekerasan fisik dan emosional masih menjadi kenyataan khususnya di lingkungan keluarga, diskriminasi terus merugikan pekerjaan orang-orang LGBT (lesbian, gay, biseksual, transgender), memperkecil prospek karir dan potensi belajar mereka di sekolah-sekolah.

Masalah LGBT di Tiongkok

Kebanyakan homoseksual (Lesbian, Gay dan transgender) mulai menyadari dirinya mempunyai kecenderungan berbeda ketika dalam usia muda. Studi menunjukkan perilaku homosexual dan ketertarikan sesama jenis banyak dijumpai sejak usia 15, prevalensinya pada pria, di Amerika 20.8%, UK 16.3%, dan

Amerika 18.5%. Sedangkan pada kelompok wanita masing-masing 17.8%, 18.6%, and 18.5%.¹⁴

Menjadi LGBT adalah upaya yang tidak mudah dan bahkan setelahnya pun bukan tanpa masalah, banyak persoalan dan risiko muncul ketika remaja muda mulai terlibat dalam hubungan sejenis, untuk remaja pria kurangnya pengetahuan mengenai risiko hubungan seks dapat menyebabkan mereka mudah terpapar HIV dan pelecehan seksual dari yang lebih berpengalaman. Ketidaktahuan keadaan diri mereka juga bisa menimbulkan gejala sosial dan depresi.

Sekitar lebih dari satu decade terakhir, isu tentang lesbian, gay, biseksual dan transgender, atau dikenal dengan istilah LGBT, mengemuka di dunia. Ini tidak lain karena semakin terlihatnya berbagai masalah social termasuk kesehatan pada kelompok LGBT. Lesbian, gay dan biseksual adalah masalah identitas seks (sexual identities), sedangkan transgender adalah masalah identitas gender (gender identity). Masalah kesehatan yang dialami LGBT diantaranya penyakit terkait perilaku seks, merokok dan pemakaian narkoba, serta masalah psikologi seperti depresi atau bunuh diri. Masalah social yang sering dialami kelompok LGBT adalah stigma dan diskriminasi, termasuk akses ke pelayanan kesehatan.

Deklarasi Hak Asasi Manusia PBB tahun 2006 menyebutkan bahwa isu LGBT direspons dengan perjuangan masuknya hasil-hasil kesepakatan sidang-sidang PBB tentang kesetaraan gender, kependudukan dan HAM. Di Tiongkok gerakan untuk mendapat pengakuan hak juga diperjuangkan oleh kaum LGBT antara lain melalui berbagai organisasi mereka. Satu studi yang dilakukan ada tahun 2013 didukung oleh USAID dan UNDP mengungkapkan bagaimana subyek LGBT hidup di Tiongkok dengan berbagai keterbatasan social.¹⁵

Diyakini dalam sejarah, kaum LGBT dikategorikan sebagai salah satu contoh pengidap penyakit mental karena mereka tidak

¹⁴ Sell RL, Wells JA, Wypij D, .The prevalence of homosexual behavior and attraction in the United States, the United Kingdom and France: results of national

population-based samples. Arch Sex Behav. 1995 Jun;24(3):235-48

¹⁵ <http://www.undp.org> diakses tanggal 17 Maret 2017

seperti orang biasa yang tertarik dengan lawan jenis ataupun tidak dapat bersanding dengan norma gender pada umumnya. Sehingga menjadi prioritas banyak psikologi hari ini adalah mengidentifikasi gejala tersebut dan menemukan cara untuk mengembalikannya kepada keadaan normal.¹⁶Bahkan kaum LGBT adalah yang paling sering depresi, serta diikuti dengan rasa cemas dan ketakutan. Kebanyakan hal tersebut disebabkan tekanan sosial dan sikap merasa tidak mendapatkan keadilan atau tindakan tidak menyenangkan. Isu LGBT ini juga masuk kedalam negara Tiongkok. Hal ini terjadi karena perkembangan globalisasi dan pola pikir masyarakat yang menjadi sangat modern. Di pertengahan tahun 2000 Beijing melihat perkembangan grup LGBT telah fokus pada promosi, budaya, social dan pendidikan seksual minoritas pada perempuan. Dalam tiga atau empat tahun lebih, kaum LGBT telah dikembangkan di Guangzhou, Shanghai dan kota metropolitan lainnya. Menurut Hinsch masuknya paham LGBT sejak abad ke 19 dan 20 ketika terjadinya pengaruh westrenisasi pada akhir dinasti Qing dan awal Republik Tiongkok.¹⁷Tetapi permasalahan mengenai LGBT atau homoseksual di Tiongkok tidaklah menjadi hal baru, karena isu ini sudah ada sejak abad ke 17 dikalangan elit. Pada tanggal 16-18 Agustus 2013 komunitas transgender Tiongkok melakukan konferensi meja bundar. Komunitas LGBT Tiongkok membawa partisipasi bersama lebih dari daratan Tiongkok tidak termasuk (Hongkong, Macau dan Taiwan).

Peran *United Nations Development Programme* (UNDP) di Tiongkok

Dalam laporan UNDP tahun 1996 menjelaskan bahwa pembangunan manusia merupakan tujuan akhir dari pembangunan (the ultimate end), sedangkan pertumbuhan ekonomi adalah sarana (the principle means) untuk mencapai tujuan akhir pembangunan. Dalam rangka

mewujudkan tujuan akhir pembangunana tersebut, ada 4 komponen pokok yang harus diperhatikan dalam pembangunan manusia, yaitu :¹⁸

1. Produktivitas (productivity), yang berarti bahwa manusia yang produktif itu adalah manusia yang berguna mampu memenuhi kebutuhan dirinya sendiri, keluarga dan bangsanya. Oleh sebab itu pertumbuhan ekonomi adalah bagian dari pembangunan manusia, dan juga merupakan variabel yang nantinya akan berdampak pada indeks pembangunan manusia (UNDP, Human Development Report, 1995).
2. Keadilan (equality), yang berarti bahwa segala hal yang tidak adil dalam kehidupan manusia harus di hapuskan seperti praktik monopoli politik maupun monopoli ekonomi karena manusia merupakan makhluk sosial yang setiap individunya diberi kesempatan yang sama untuk menjalankan hidup yang lebih baik sesuai dengan aturan yang telah ditentukan secara konstitusional dan demokratis (UNDP, Human Development Report, 1995).
3. Keberlanjutan (sustainability), yang bermakna bahwasanya setiap individu mempunyai tanggungjawab dalam pembangunan manusia yang berkelanjutan yang artinya sumber daya yang dapat diperbaharui yang tersedia saat ini merupakan kekayaan yang nantinya akan diperlukan oleh generasi yang akan datang yang harus dijaga, sedangkan sumberdaya yang tidak dapat diperbaharui harus digunakan secara bijak dan mencari substitusi sumberdaya alternatif dari sumberdaya tersebut (UNDP, Human Development Report, 1995).
4. Pemberdayaan (empowerment), kita ketahui bahwa manusia memiliki

¹⁶ Victoria Clark, Sonja J.Ellis, Elizabeth Peel, Damien W.Riggs, Lesbian Gay Bisexual Trans And Queer Psychology. New York: Cambridge University Press, 2010 hal.88

¹⁷ Bret Hinsch. *Passion of The Cut Sleeve*.1990.University of California press. Hal 35-36

¹⁸ David Paternotte and Manon Tremblay. *The Ashgate Research Companion to Lesbian and Gay Activism*.2016.New York:Ashgate Publishing hal.92

keterbatasan masing-masing dalam mensejahterakan kehidupannya, sehingga perlu diadakannya pemberdayaan optimal agar terwujudnya pembangunan manusia. Dengan adanya pemberdayaan maka seluruh masyarakat berpartisipasi penuh dalam proses pengambilan putusan yang mempengaruhi kesejahteraan mereka (UNDP, Human Development Report, 1995)

Untuk mendukung komunitas lesbian, gay, biseksual, transgender dan interseks (LGBT), salah satu badan PBB, United Nations Development Programme (UNDP) menjalin kemitraan regional dengan Kedutaan Swedia di Bangkok, Thailand dan USAID. Dana sebesar US\$ 8 juta (sekitar Rp 108 miliar) pun dikucurkan kepada beberapa negara yang kemitraannya salah satunya adalah Tiongkok. Inisiatif ini dimaksudkan untuk memajukan kesejahteraan komunitas lesbian, gay, biseksual, transgender (LGBT), dan mengurangi ketimpangan dan marginalisasi atas dasar orientasi seksual dan identitas gender (SOGI).

Disebutkan UNDP, bahwa inisiatif ini adalah kolaborasi dengan masyarakat sipil, yang melibatkan institusi-institusi nasional dan regional untuk memajukan hukum dan kebijakan protektif, serta memberdayakan masyarakat sipil. Di dalam keterangan situs UNDP menyebutkan kalau proyek ini dimulai pada Desember 2014 hingga September 2017 mendatang.

Kemudian UNDP pun merinci sejumlah tujuan dari proyek kemitraan regional ini. Salah satunya adalah mendukung kaum LGBT untuk mengetahui hak-hak mereka dan mendapatkan akses ke pengadilan guna melaporkan pelanggaran-pelanggaran HAM. Adapun hasil-hasil yang ingin dicapai dari proyek ini, salah satunya adalah meningkatnya kemampuan organisasi-organisasi LGBT untuk secara efektif memobilisasi, menyokong dan berkontribusi

dalam dialog-dialog kebijakan dan aktivitas pemberdayaan komunitas serta membantu LGBT untuk mendapatkan hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat.

Kebijakan Pemerintahan Tiongkok

Sebelum tahun 1990-an, gerakan Lesbian Gay Biseksual Transgender (LGBT) di Tiongkok sedikit. Namun pada pertengahan hingga akhir 1990-an, pertemuan sosial Lesbian Gay Biseksual Transgender (LGBT) mulai terorganisir. Dengan pengembangan dan perluasan internet di awal 2000-an, Lesbian Gay Biseksual Transgender (LGBT) di Tiongkok mulai untuk membentuk online forum untuk mendiskusikan pengalaman dan terhubung dengan satu sama lain.

kompetitif.¹⁹

Saat ini dalam hal dana, sumber utama pendanaan untuk organisasi social bagi Lesbian Gay Biseksual Transgender (LGBT) adalah pemerintah. Namun, kelompok komunitas LGBT kedudukan secara hukum kurang kuat, serta pemerintah berkeyakinan bahwa gerakan masyarakat atau LSM Lesbian Gay Biseksual Transgender (LGBT) tidak sah. Pejabat pemerintah di Tiongkok yang menangani pendaftaran organisasi LGBT tidak memiliki pengetahuan tentang LGBT. Posisinya sejumlah pemangku kepentingan internasional, termasuk Yayasan Asing, Kedutaan besar, internasional yang beberapa lembaga dan PBB di Tiongkok mulai mendukung komunitas LGBT. Namun, karena kebanyakan lembaga donor tidak berkedudukan di Tiongkok, dana yang diberikan relatif kecil dan tidak cukup untuk mempertahankan pertumbuhan komunitas LGBT di seluruh Tiongkok.

LGBT Sebelum dan Sesudah masuknya UNDP

Terlepas dari kesulitan metodologis dalam menjumlah komunitas LGBT di level internasional, di tingkatan nasional, survey demografis dalam menghitung atau

¹⁹ Denis Hew, *Toward an ASEAN Economic by 2015*, dalam *The ASEAN Community: Unblocking the*

Roadblocks, Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS), Singapore, 2008. Hlm. 16.

memperkirakan atau melakukan estimasi jumlah komunitas LGBT belum pernah dilakukan Tiongkok. Satu-satunya estimasi yang pernah dilakukan untuk memperkirakan populasi LGBT adalah estimasi yang dilakukan dalam kerangka penanggulangan HIV dan AIDS. Tapi perlu segera dicatat, bahwa estimasi ini memiliki kelemahan sebagai berikut :

- a. Kategori yang digunakan dalam estimasi ini adalah kategori “laki-laki yang pernah berhubungan dengan laki-laki” atau disingkat LSL. Implikasinya adalah bahwa kategori ini belum tentu mewakili populasi komunitas gay. Karena, gay adalah bentuk orientasi seksual, sedangkan LSL lebih pada bentuk perilaku seksual.
- b. Estimasi ini juga belum bisa menghitung besaran kuantitatif komunitas lesbian dan biseksual.

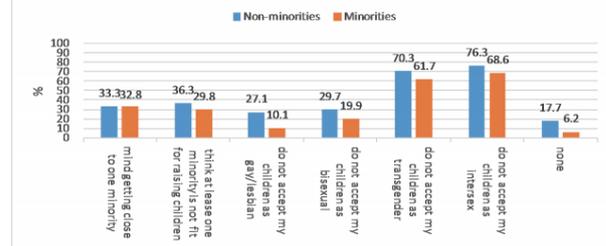
Satu fakta penting bagaimana gerakan komunitas LGBT terangkat seiring dengan program HIV dan AIDS, dalam relasi yang cukup kompleks. Dengan gelontoran program dan anggaran ini, dalam satu dan banyak situasi, ditemukan konsolidasi dan koordinasi oleh dan untuk komunitas tersebut mulai dijalankan. Akan tetapi, di lain sisi, semakin gerakan gay dan waria masuk ke dalam lingkaran penanggulangan HIV dan AIDS, maka secara langsung atau tidak langsung, ada beberapa titik kritis dan dalam jangka panjang dapat merugikan bagi komunitas gay dan waria.

LGBT Sebelum masuknya UNDP

Perkembangan LGBT di Tiongkok berkaitan dengan adanya penyebaran penyakit HIV/AIDS. LGBT dianggap sebagai faktor utama dari adanya penyakit HIV/AIDS ini yang membuat masyarakat sangat tidak menyukai LGBT karena dianggap selain kaum penyebar penyakit juga perilaku yang menyimpang. Sehingga, persoalan LGBT dalam kerangka penanggulangan HIV dan AIDS yang berorientasi medis semata, susah untuk diharapkan untuk bisa sampai pada perjuangan hak mereka untuk diakui setara dan normal, khususnya hak-hak seksual mereka.

Ketiga, karena basis analisis faktor risiko ditekankan pada aspek perilaku, maka komunitas lesbian dan interseks menjadi bukan bagian prioritas dalam penanggulangan HIV dan AIDS.

Gambar 7. Grafik Mengenai Respon Masyarakat Tiongkok terhadap Kaum Minoritas

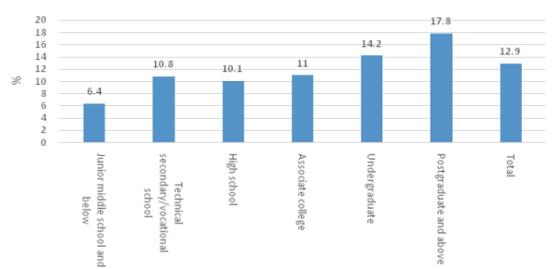


Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bahwa masyarakat Tiongkok tidak begitu tertarik terhadap minoritas HIV/AIDS dan pasangan gender (homoseksual). Dari hal ini dapat dinyatakan bahwa kaum LGBT itu terlalu terlihat karena dikucil dari masyarakat. Dan banyak masyarakat yang tidak setuju dengan adanya hubungan sesama jenis mau pun transgender. LGBT dianggap sebagai pelaku dalam berkembangnya HIV/AIDS di Tiongkok, hal ini karena masyarakat berpikiran tindakan yang menyimpang yang dilakukan oleh kaum LGBT yang menganggap kaum LGBT adalah bentuk kebebasan dapat berdampak buruk bagi para penerus bangsa.

LGBT Sesudah Masuknya UNDP

LGBT mulai melakukan beberapa aksinya sejak mendapatkan dukungan dari UNDP yang ingin membantu kaum LGBT Tiongkok untuk mencapai tujuannya. Komunitas LGBT melakukan beberapa komunikasi dengan Komunitas LGBT lainnya yang berapa di Tiongkok melalui situs website yang disediakan hanya yang khusus untuk LGBT Tiongkok. Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Gambar 8. Pendidikan Gender di Sekolah



Gambar 9. Pembelajaran Mengenai Minoritas dan Peraturan Anti Diskriminasi LGBT di Tempat Kerja



Berdasarkan gambar grafik diatas dapat dilihat bahwa adanya pembelajaran mengenai gender di sekolah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menghargai perbedaan gender terutama kepada LGBT. Di tempat kerja pun juga diadakannya pembelajaran mengenai minoritas dan anti diskriminasi terhadap LGBT agar masyarakat lebih menghargai kaum LGBT. Hal ini merupakan salah satu bentuk dari LGBT Movement yang didukung dan dibantu oleh UNDP.

Proses UNDP dalam Melegalkan Pernikahan LGBT di Tiongkok

Tujuan UNDP di Tiongkok terkait erat dengan pemerintah. Serta menerapkan langkah-langkah untuk memfasilitasi pencapaian Sasaran Pembangunan Berkelanjutan (SDG) yang baru diadopsi, kami memberikan dukungan kepada pembangunan domestik pemerintah sebagai bagian dari Rencana Lima Tahun ke 13, yang utamanya adalah untuk mengurangi ketidaksetaraan, mengkalibrasi ekonomi. Untuk pertumbuhan yang inklusif dan stabil, mengurangi dampak lingkungan dari perkembangan pesat Tiongkok, dan melanjutkan kemunculan Tiongkok sebagai pemain kunci di panggung global.

Gambar 10 Sustainable Development Goals

Sumber : www.undp.org



Di Tiongkok United Nations Development Programme (UNDP) terlibat dalam perjuangan homoseksual secara international. Salah satu langkah yang diambil adalah membentuk sebuah wadah international homoskesual khususnya negara-negara Asia yang bernama 'Being LGBT in Asia'. Salah satu negara yang terlibat adalah Tiongkok. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan adalah melakukan dialog-dialog LGBT di beberapa negara di Asia.

Hukum Perkawinan Republik Rakyat Tiongkok mendefinisikan bahwa perkawinan sebagai persatuan antara satu orang pria dengan satu orang wanita dan tidak adanya pernikahan antara sesama jenis. Hak untuk menikah merupakan sasaran gerakan hak LGBT di Asia termasuk Tiongkok. Li Yinhe merupakan seorang ilmuwan seksologi dan anggota dari UNDP China mengajukan sebuah RUU pernikahan sesama jenis sebagai amandemen undang-undang pernikahan ke Konferensi Konsultatif Politik Rakyat Tiongkok. Akan tetapi proposal yang di ajukan oleh Li Yinhe gagal dan pada tahun 2008 pendukung hak LGBT dan di bantu oleh UNDP membuat kampanye untuk mengumpulkan tanda tangan yang meminta adanya pengakuan atas pernikahan sesama jenis.

Pada tanggal 05 Januari 2016 sebuah pengadilan di Changsha, Provinsi Hunan Selatan Tiongkok adanya pengajuan izin dari Sun Wenlin untuk menikahi rekan prianya yang diajukan sebelumnya pada Desember 2015 tetapi ditolak oleh Biro Urusan Sipil. Mendengar hal tersebut pada tanggal 13 April 2016 UNDP membantu para kaum LGBT dan pendukung pernikahan sesama jenis untuk melakukan kampanye besar-besaran didepan pengadilan Changsha ini dilakukan untuk kemajuan kaum LGBT di Tiongkok. Hal tersebut membuat Dewan Agung Tiongkok mendukung adanya pernikahan sesama jenis karena didasari dengan adanya HAM dan membuat Sun Wenlin dapat melakukan pernikahan di Changsha, Tiongkok meskipun ini dilakukan secara privat. Keputusan dewan agung Tiongkok yang memberikan hak untuk

menikahi sesama jenis dan belum adanya undang-undang resmi tentang pernikahan sesama jenis, tetapi ini hanya menunggu waktu saja hingga pemerintah secara resmi menyatakan bahwa diperbolehkannya pernikahan sesama jenis.

Rekomendasi UNDP mengenai LGBT di Tiongkok

Dialog komunitas LGBT yang diselenggarakan oleh UNDP di Tiongkok pada 16 – 18 Agustus 2013 di Beijing merekomendasikan bagi pemerintah Tiongkok:²⁰

1. Menciptakan lingkungan yang lebih memungkinkan bagi organisasi masyarakat sipil LGBT: memfasilitasi secara hukum pendaftaran kelompok komunitas LGBT dan pendaftaran organisasi sosial pencegahan HIV dengan meningkatkan koordinasi antara Kementerian urusan sipil, Departemen Keuangan, dan kesehatan nasional dan Komisi keluarga berencana. Organisasi internasional bisa memberikan contoh dari negara lain dan teknis dukungan yang diperlukan.
2. Memperbaiki undang-undang terhadap kesetaraan gender: mengubah undang-undang saat ini dan lebih memperhatikan isu-isu yang berkaitan dengan orientasi seksual dan identitas gender kelompok atau komunitas LGBT. Membuat koneksi antara komunitas LGBT dan ahli-ahli hukum, Deputi dan perwakilan dari kantor-kantor utama seperti Komisi Urusan Legislatif Rakyat Nasional di Kongres dan kantor urusan legislatif Dewan negara.
3. Meningkatkan kesadaran: mendidik PNS dan hakim untuk meningkatkan pengetahuan mereka tentang isu-isu LGBT di wilayah Tiongkok di tingkat daerah dan pusat tingkatan dengan fokus pada anti-diskriminasi.

4. Termasuk pengembangan budaya LGBT dan ekspresi: di bidang film, sastra dan seni.
5. Melindungi hak-hak LGBT melalui undang-undang dan kebijakan di berbagai area:
6. Memperkenalkan atau merevisi perundang anti-diskriminasi dan anti-domestik.
7. Menetapkan peraturan untuk melindungi hak-hak pasangan sejenis seperti bidang properti, kunjungan rumah sakit, adopsi, dan warisan, membuat mereka sama dengan pasangan heteroseksual menikah.
8. Penggantian gender pada sertifikat pendidikan ketika seseorang menjadi transgender dan dokumen identitas lainnya.
9. Reformasi "layanan sipil" untuk mengizinkan orang LGBT positif HIV untuk bekerja di pelayanan sipil dan perusahaan-perusahaan umum.
10. Mengurangi pembatasan pendidikan seks dan gender.
11. Mengidentifikasi departemen pemerintah tertentu bertanggung jawab dalam permasalahan LGBT.

Merekomendasikan bagi komunitas LGBT :

1. Kerjasama: Lebih berpengaruh dan mendirikan organisasi untuk menjangkau kepada kelompok-kelompok lainnya yang terpinggirkan sebagai mitra seajar
2. Memperkuat penelitian: Membangun mekanisme koordinasi untuk lembaga-lembaga akademik untuk melakukan penelitian pada permasalahan LGBT.
3. Meningkatkan kapasitas teknis dan pelatihan: direkomendasikan pelatihan untuk kelompok LGBT
4. Bidang pendidikan yakni mengidentifikasi buku dan bahan pengajaran yang berisi informasi yang keliru mengenai isu-isu LGBT dan mengusulkan koreksi kepada pihak berwenang

²⁰ USAID. Being LGBT in Asia: Tiongkok Country Report.pdf. 2014. Bangkok hal.19

5. Memfasilitasi dialog dengan Departemen Pendidikan terhadap kekhawatiran dari orang-orang transgender, seperti perubahan jenis kelamin pada sertifikat pendidikan dan fasilitas dalam pengaturan pendidikan. Bekerja dengan guru, lembaga pendidikan dan otoritas pendidikan untuk menghentikan bullying sekolah terhadap LGBT dan menciptakan kelompok pendukung bagi korban bullying.

KESIMPULAN

Sebagai anggota Perserikatan Bangsa-bangsa, Tiongkok juga menandatangani berbagai perjanjian-perjanjian internasional yang mempromosikan hak asasi manusia. Ini termasuk Kovenan Internasional tentang ekonomi, sosial dan budaya hak (sipil), Konvensi tentang penghapusan dari semua bentuk diskriminasi terhadap perempuan (CEDAW), konvensi hak-hak dari anak (UNCRC), Konvensi Menentang Penyiksaan dan lainnya, Konvensi Tentang larangan dan penghapusan pekerja anak, dan konvensi hak-hak orang cacat. Sikap pemerintah Tiongkok pada Lesbian Gay Biseksual Transgender (LGBT) secara umum ambivalen.

Pelegalan pernikahan sesama jenis di Tiongkok masih dalam sebuah tahap dari UNDP. UNDP membantu kaum LGBT dalam pelegalan pernikahan sesama jenis ini karena hak untuk menikah juga harus didapatkan oleh kalangan LGBT ini sebabkan karena adanya hak asasi manusia dimana semua manusia mendapatkan hak yang sama. UNDP membantu kaum LGBT Tiongkok dari mensurvei berapa banyak masyarakat Tiongkok yang LGBT. UNDP membantu dalam penyumbangan dana untuk kampanye komunitas LGBT di Tiongkok. Hingga saat ini belum ada undang-undang resmi tentang pernikahan sesama jenis, tetapi di masyarakat Tiongkok pernikahan sesama jenis sebuah hal biasa karena mereka menganggap bahwa homoseksual adalah bagian dari budaya negara mereka.

Daftar Pustaka Jurnal

Duggan, L. 2002. *The incredible shrinking public: Sexual politics and the decline of democracy*. Boston, MA: beacon Press.

Foucault, M. 1978. *The history of sexuality, Vol.1, An Introduction* (R. Hurley, Trans) New York, NY: Pantheon. (Original work published 1976)

Hildebrandt, Timothy, *Development and Division: the effect of transnational linkages and local politics on LGBT activism in China*, Journal of Contemporary China, 2012.

Hinsch, Bret. *Passions of the Cut Sleeve*. University of California Press, 1990

Jummar Syamdani, 2014, *Peran United Nations Development Programme (UNDP) Dalam Program Pembangunan Manusia Di India*, ejournal.hi.fisip-unmul.org

M. Saeri Jurnal Transnasional, Februari 2012. "Teori Hubungan Internasional Sebuah Pendekatan Paradigmatik". Hlm 15-16 Vol 2, No 2

Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*: Bandung: Rosdakarya

Mulatua, Bona, 2007, *Kajian Jender Terhadap Perkawinan Sejenis (Khususnya Homoseksual) Di Indonesia*. S1 thesis, UAJY.

Suwarti Sari, 2016, *Peran United Nations Development Programme (UNDP) Dalam Mewujudkan Millenium Development Goals (MDGs) 2015*, Universitas Jenderal Achmad Yani, <http://jipsi.fisip.unikom.ac.id>

Buku-buku :

Abdul, Kadir Hatib. 2007. *Tangan Kuasa dalam Kelamin Telaah Homoseks, Pekerja Seks dan Seks Bebas di Indonesia*. Yogyakarta : Insist Press

Agus Haryanto. Desember 2014. "Prinsip Bebas Aktif Dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia: Perspektif Teori Peran", Vol. 4, No. 02.

- Ananda Ruriska Saputri. 2014. “Peran ASEAN intergovernmental Commission Of Human Rights (AICHR) Dalam Menegakkan Hak Asasi Manusia. Vol. 2, No. 01.
- Archer, Clive. 1983. *Interntional Organization*. (London, University of Aberdeen.)
- Bakry, U. S. (1999). Pengantar Hubungan Internasional. Jakarta: University Press.
- Bennet, A. L. (2001). *International Organizations: Principles and Issues*. New Jersey: Prentice Hall.
- Blackwood, Evelyn. “Gender, Seksualitas dan Hasrat Queer”. Mendengar Suara Lesbian Indonesia, eds. Sri Agustine dan Evi Lina Sutrisno. Jakarta : Ardhanary Institute, 2013
- Bret Hinsch. *Passion of The Cut Sleeve*. 1990. University of California press.
- Cameron G Thies, *Role the Teory and Foreign Policy*, University of Lows. 2009. Yang diakses dari <http://myweb/lows.edu/bhlas/workshop/role.pdf> Pada tanggal 20 januari 2016
- Fakih, M. 2004. Analisis Gender dan Transformasi Sosial. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Firestein, Beth A. (2007). *Becoming Visible: Counseling Bisexuals Across the Lifespan*. Columbia University Press
- Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Penedekatan Proposal*: 2004. Jakarta: Bumi Aksara.
- May Rudy, Teuku. 2005. *Admistrasi Dan Organisasi Internasional*. Bandung. Refika Aditama
- P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*: 2004. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Priaga, Lanang. 2003. Menembus Kaum Gay Jakarta. Jakarta : Abdi Tandur
- Ramlan Surbakti, *Metodologi ilmu politik*, Fisip-UNAIR Press Surabaya. 1987.
- Sell RL, Wells JA, Wypij D, .The prevalence of homosexual behavior and attraction in the United States, the United Kingdom and France: results of national population-based samples. *Arch Sex Behav*. 1995
- Scott Burchill dan Andrew Linklater. *Theories of International Relation*. 2009. New York: ST Martin’s Press, INC.
- Siahaan, Jokie M.S. 2009. *Perilaku Menyimpang: Pendekatan Sosiologis*. Jakarta: PT. Indeks.
- Soerjono. 2004. *Sosiologi Keluarga Tentang Ikhwal Keluarga, Remaja dan Anak*. Jakarta : PT Rineka Cipta
- Suryokusomo, Sumaryo. 1990. *Hukum Organisasi Internasional*. Jakarta. UI-PRESS
- Victoria Clark, Sonja J.Ellis, Elizabeth Peel, Damien W.Riggs, *Lesbian Gay Bisexual Trans And Quer Psychology*, (New York: Cambridge University Press, 2010),
- Zul Asri. Oktober 2014. “Peran *Court Of Arbitration For Sport* Dalam Menangani Kasus Rasis Dan Diskriminasi Dalam Sepakbola di Eropa”. Vol.1, No. 02.

Website :

- <http://ilmupengetahuanumum.com/profil-negara-china-tiongkok/>
- <http://lana.staff.gunadarma.ac.id/> .
- <http://pedulisehat.info/homoseksual-dianggap-penyakit-warga-china-protos/>
- <http://www.cnnindonesia.com/internasional/20151230131151-113->
- <http://www.equaldex.com/region/china>
- <http://www.etymonline.com>
- <http://www.scrib.com/doc/38439102/Pengertian-organisasi-internasional>
- <http://www.statista.com/topics/2314/lgbt-in-china/>

<http://www.statista.com/topics/2314/lgbt-in-china/>

<http://www.suarakita.org/2012/11/menelidik-homoseksual-di-cina/>

<http://www.undp.org/>

<http://www.voaindonesia.com/a/china-gelar-sidang-kasus-pernikahan-sejenis-/3133223.html>

<http://www.voaindonesia.com/a/china-lakukan-diskriminasi-terhadap-lgbt-/>

<http://www.voaindonesia.com/content/china-gelar-sidang-kasus-pernikahan-sejenis-/3133223.html>

Dokumen :

Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa di Indonesia .Ed.II 1989 (revisi)
Jakarta.Direktorat Kesehatan Jiwa,
Direktorat Jenderal Pelayanan Medik,
Departemen Kesehatan RI,1985

Epidemiologi HIV-AIDS di Kota Bandung.
Bandung: Dinas Kesehatan Kota Bandung;
2012